

AKSES DAN KEMITRAAN ORGANISASI SENI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Inten Larasaty

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

e-mail: ilarasathy@iahntp.ac.id

Diterima: 27/8/2026; Direvisi: 10/9/2026; Diterbitkan: 28/9/2026

ABSTRAK

Keberlanjutan organisasi seni pertunjukan di tingkat lokal amat bergantung pada efektivitas kemitraan dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis akses dan keberlanjutan kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi seni pertunjukan di Kota Palangka Raya, yang mencakup identifikasi bentuk dan mekanisme dukungan pemerintah, strategi organisasi seni dalam memperoleh serta mempertahankan dukungan, hingga pertimbangan pemerintah dalam memilih maupun melanjutkan kerja sama. Lewat pendekatan kualitatif, data dihimpun dari enam orang informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, mencakup lima penggiat sanggar seni dan satu pejabat pemerintah terkait. Analisis data dilakukan dengan memetakan bentuk fasilitas, pola negosiasi, serta faktor penentu keberlanjutan kerja sama. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa fasilitasi publik berwujud pendanaan, ruang pentas, sarana, hingga rujukan kegiatan. Dalam mengaksesnya, para pelaku seni menerapkan taktik pencarian peluang, *personal branding*, penguatan legalitas, dan adaptasi birokrasi tanpa mengorbankan integritas artistik. Sementara itu, kriteria keberlanjutan dari sudut pandang birokrasi berpijak pada kelayakan proposal, ketersediaan alokasi anggaran, kelancaran komunikasi, serta rekam jejak eksekusi program. Disimpulkan bahwa kesinambungan hubungan kemitraan ini tidak bertumpu pada satu arah, melainkan hasil kompromi dinamis antara kapasitas kelembagaan komunitas seni dan fleksibilitas tata kelola pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Dukungan Pemerintah, Kapasitas Organisasi, Kemitraan, Organisasi Seni*

ABSTRACT

The sustainability of local performing arts organizations relies heavily on the effectiveness of their partnerships with local governments. This study aims to analyze the access to and sustainability of partnerships between local government and performing arts organizations in Palangka Raya City, encompassing the identification of government support forms and mechanisms, the strategies employed by arts organizations to secure and maintain support, and the government's considerations in selecting and continuing collaborations. Using a qualitative approach, data were gathered from six informants selected through *purposive sampling*, comprising five arts group leaders and one relevant government official. Data analysis was conducted by mapping types of support, negotiation patterns, and key factors determining partnership continuity. Research findings indicate that public facilitation takes the form of funding, performance venues, facilities, and activity recommendations. In accessing these opportunities, artists employ tactics such as opportunity scanning, personal branding, legal strengthening, and bureaucratic adaptation without compromising their artistic integrity. Meanwhile, sustainability criteria from the bureaucratic perspective rest on proposal feasibility,

budget availability, smooth communication, and past program execution track records. The study concludes that the continuity of this partnership relationship does not rely on a single party, but is rather the outcome of dynamic compromise between the institutional capacity of arts communities and the governance flexibility of local government.

Keywords: *Government Support, Organizational Capacity, Partnership, Arts Organizations*

PENDAHULUAN

Seni pertunjukan merupakan bagian dari ekspresi kebudayaan yang keberlangsungannya berkaitan dengan kemampuan pelaku seni, organisasi, dan lingkungan kelembagaan dalam menjaga serta mengembangkan aktivitas kesenian. Di tingkat lokal, organisasi seni tidak hanya berperan sebagai ruang penciptaan dan pementasan karya, tetapi juga menjadi wadah pembinaan, pewarisan pengetahuan, dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kehidupan budaya. Upaya menjaga keberlangsungan seni pertunjukan karena itu tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan organisasi dan dukungan ekosistem yang menaunginya. Handyaningrum et al. (2021), melalui kajian pengelolaan konservasi seni pertunjukan berupa tari tradisional di Jawa Timur, memberikan konteks mengenai pentingnya pengelolaan dalam upaya mempertahankan keberadaan seni. Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan kebudayaan juga dapat melibatkan beragam model, mulai dari dukungan publik, swasta, hingga bentuk hibrida, sebagaimana dibahas Lin dan Luo (2023).

Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur yang dapat membuka kesempatan bagi organisasi seni untuk menyelenggarakan kegiatan, mengembangkan kapasitas, dan menjangkau masyarakat. Bentuk dukungan tersebut dapat berkaitan dengan pembiayaan, penyediaan fasilitas, kesempatan tampil, maupun keterlibatan dalam program kebudayaan. Akan tetapi, keberadaan program pemerintah tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap organisasi memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses atau mempertahankan dukungan. Organisasi juga perlu berhadapan dengan mekanisme pengajuan, persyaratan administrasi, keterbatasan anggaran, serta pertimbangan kelembagaan dalam penentuan mitra. Pembahasan Lin dan Luo (2023) mengenai model pendanaan seni dan kebudayaan memberikan landasan untuk melihat dukungan pemerintah sebagai bagian dari sistem pembiayaan yang memiliki bentuk dan mekanisme tertentu, bukan sebagai sumber daya yang selalu tersedia tanpa batas.

Dalam penyelenggaraan seni dan kebudayaan, hubungan antara pemerintah dan organisasi seni juga berlangsung dalam lingkungan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hidayat et al. (2025) mengangkat peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang, sedangkan Fajri dan Fatticia (2025) membahas strategi kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Kedua kajian tersebut memberikan konteks bagi pembahasan mengenai keterlibatan pemerintah dan kerja sama antarpihak dalam pengembangan kegiatan berbasis budaya dan kreativitas. Pada tingkat organisasi, Ardiyasa (2021) secara khusus membahas strategi peningkatan stakeholder baru bagi organisasi seni pertunjukan, yang relevan dengan persoalan pengembangan hubungan eksternal organisasi. Sementara itu, Syaifudin (2025) mengangkat pengelolaan hubungan dengan berbagai stakeholder dalam manajemen strategis. Rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa relasi eksternal dan tata kelola merupakan ranah yang perlu diperhatikan ketika menelaah hubungan organisasi dengan lingkungan kelembagaannya.

Keberlanjutan organisasi seni juga berkaitan dengan kapasitas internal dan kemampuan menyesuaikan pengelolaan kegiatan terhadap kondisi yang dihadapi. Ardiansyah et al. (2026), melalui kajian penguatan ekosistem seni tradisional Sasak, mengangkat aspek tata kelola keuangan, pertunjukan kreatif, dan branding budaya dalam konteks komunitas seni. Kajian Hajmohammad et al. (2026) membahas inovasi untuk keberlanjutan finansial pada organisasi orkestra simfoni nirlaba dengan perspektif dynamic capabilities. Kedua rujukan tersebut memberi konteks untuk mempertimbangkan bahwa pengembangan organisasi seni dapat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, inovasi, serta strategi mempertahankan kegiatan. Selain itu, Sukardi et al. (2025) membahas kolaborasi antara aktor pemerintah dan asosiasi museum daerah dalam pelestarian bangunan heritage, sedangkan Nisa et al. (2025) mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya. Walaupun konteks kelembagaan dan objek kajian tersebut berbeda dari organisasi seni pertunjukan di Palangka Raya, keduanya dapat menjadi bahan pembandingan untuk memahami keterlibatan pemerintah dan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya budaya.

Meskipun berbagai kajian tersebut telah membahas pengelolaan seni, pendanaan kebudayaan, hubungan stakeholder, kolaborasi, serta keberlanjutan organisasi atau kegiatan budaya, persoalan akses dan keberlanjutan kemitraan pemerintah–organisasi seni masih perlu ditelaah dengan memperhatikan pengalaman konkret para pihak. Secara khusus, perlu dipahami bagaimana organisasi seni mempersiapkan diri untuk mengakses dukungan, bagaimana mereka membangun komunikasi dan memenuhi mekanisme yang berlaku, serta bagaimana pemerintah mempertimbangkan usulan dan menentukan bentuk fasilitasi. Persoalan ini juga mencakup kemungkinan adanya perbedaan kebutuhan antara organisasi dan pemerintah, terutama ketika rencana kegiatan berhadapan dengan keterbatasan anggaran atau pertimbangan program. Dengan demikian, perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada keberadaan dukungan pemerintah, tetapi juga pada proses yang menghubungkan kapasitas organisasi, mekanisme kelembagaan, dan interaksi antarpihak dalam kemitraan.

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut melalui pengalaman organisasi seni yang terlibat dalam penyelenggaraan seni pertunjukan yang difasilitasi pemerintah daerah. Keberagaman pengalaman organisasi dalam memperoleh dan mempertahankan dukungan memungkinkan penelitian menelaah bagaimana akses kemitraan dijalani dalam kondisi sumber daya, jaringan, dan prioritas kegiatan yang tidak selalu sama. Pengalaman pihak pemerintah juga diperlukan untuk memahami pertimbangan dalam menerima usulan, menyesuaikan kegiatan dengan program dan anggaran, serta menentukan kelanjutan kerja sama. Dengan mempertemukan pengalaman organisasi dan pemerintah, penelitian ini berupaya menghindari pemahaman yang hanya menempatkan akses dukungan sebagai hasil dari inisiatif satu pihak. Sebaliknya, kemitraan ditelaah sebagai proses yang melibatkan kesiapan organisasi, mekanisme pemerintah, dan interaksi yang berlangsung di antara keduanya.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis akses dan keberlanjutan kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi seni pertunjukan di Kota Palangka Raya. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme dukungan pemerintah, memahami upaya organisasi seni dalam memperoleh serta mempertahankan dukungan, dan mengkaji pertimbangan pemerintah dalam memilih maupun melanjutkan kerja sama. Penelitian ini juga menelaah bagaimana kapasitas organisasi, jaringan, komunikasi, negosiasi, serta perbedaan kebutuhan dan prinsip artistik hadir dalam pengalaman kemitraan tersebut. Fokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kontekstual mengenai

proses hubungan pemerintah dan organisasi seni, sekaligus memperkaya pembahasan tentang tata kelola kemitraan dalam ekosistem seni pertunjukan daerah.

METODE PENELITIAN

Perjalanan penggalian data di Kota Palangka Raya sepanjang Januari hingga Juli 2026 ini berpijak pada desain kualitatif deskriptif guna membedah dinamika kemitraan pemerintah daerah dengan eksponen seni pertunjukan. Sebelum melangkah pada pengumpulan informasi di lapangan, peneliti memastikan seluruh prosedur etis terpenuhi dengan mengantongi persetujuan tertulis (*informed consent*) dari setiap partisipan yang terlibat. Akses terhadap calon informan diawali dari pemetaan basis data Dewan Kesenian Palangka Raya (DKPR) yang kemudian ditapis secara *purposive* berdasarkan pengalaman konkret organisasi dalam mengakses maupun mengelola dukungan publik. Peneliti akhirnya menetapkan lima perwakilan organisasi seni (yang disamakan sebagai I1, I2, I3, I4, dan I5 demi menjaga kerahasiaan identitas) serta seorang pejabat instansi pemerintah terkait (IP) sebagai narasumber utama.

Pengungkapan realitas di lapangan tidak mengandalkan satu pintu, melainkan memadukan teknik wawancara *semi-structured*, pengamatan (*observation*) secara langsung pada gelaran seni yang difasilitasi pemerintah, serta penelusuran dokumen pendukung. Seluruh instrumen penggalian data baik panduan wawancara maupun lembar observasi—merupakan alat catat yang dikembangkan secara mandiri oleh peneliti dan telah melewati tahap uji validasi oleh ahli (*expert judgment*) sebelum digunakan. Pendokumentasian data sekunder dilakukan dengan mencermati arsip kegiatan, rekaman pertunjukan, catatan lapangan, hingga linimasa media sosial resmi UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah dan sanggar seni terkait. Integrasi ketiga teknik ini terbukti efektif dalam memotret bagaimana strategi organisasi dibangun, mekanisme fasilitasi dijalankan, serta atas pertimbangan apa sebuah kemitraan dipertahankan.

Untuk menguji keabsahan materi yang terhimpun, peneliti menerapkan triangulasi teknik dengan saling mengecek kesesuaian antara penuturan lisan informan, bukti dokumen, dan realitas hasil observasi. Proses olah data itu sendiri mengadopsi alur analisis interaktif model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup tahap kondensasi data, pemetaan visual atau penyajian data, hingga penarikan serta verifikasi simpulan. Setiap fase analisis ditujukan secara konstan untuk mengurai kerumitan interaksi, bentuk fasilitasi, hingga arena negosiasi dan kompromi artistik antara pihak birokrasi dan pelaku seni. Melalui pendekatan yang refleksif ini, temuan penelitian disajikan secara kontekstual tanpa mencabut narasi pengalaman dari ruang sosial asli para informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Bentuk dan Mekanisme Dukungan Pemerintah terhadap Organisasi Seni

Dukungan pemerintah terhadap organisasi seni di Kota Palangka Raya disampaikan melalui beberapa bentuk fasilitasi, antara lain bantuan pendanaan, penyediaan fasilitas, kesempatan untuk tampil, serta akses terhadap program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Informasi dari pihak pemerintah menunjukkan bahwa organisasi dapat menyampaikan usulan kegiatan melalui proposal dan komunikasi dengan pihak terkait. Namun, pemberian dukungan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan program yang

sedang dijalankan. Rangkuman bentuk dan mekanisme dukungan yang ditemukan dalam wawancara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk dan Mekanisme Dukungan Pemerintah terhadap Organisasi Seni

No.	Bentuk dukungan	Mekanisme atau keterangan berdasarkan hasil penelitian
1	Dukungan pendanaan	Organisasi mengajukan usulan kegiatan melalui proposal. Pemberian pendanaan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pemerintah.
2	Penyediaan fasilitas	Pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas untuk menunjang kegiatan seni tertentu.
3	Kesempatan tampil	Organisasi memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pertunjukan yang difasilitasi pemerintah.
4	Akses terhadap program kegiatan	Organisasi dapat memperoleh informasi atau kesempatan mengikuti program pemerintah melalui pengajuan usulan dan komunikasi dengan pihak terkait.
5	Rujukan atau penghubung kegiatan	Hubungan dengan pihak pemerintah dapat membuka akses informasi atau menghubungkan organisasi dengan kegiatan yang relevan.
6	Seleksi usulan	Usulan kegiatan dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian dengan program dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Tabel 1 memperlihatkan bentuk dukungan yang disebutkan dalam data penelitian serta mekanisme yang menyertainya. Informasi dari pihak pemerintah (IP) mencakup pengajuan proposal, komunikasi mengenai kebutuhan kegiatan, dan pertimbangan anggaran. Dukungan yang diberikan tidak terbatas pada pendanaan, tetapi juga mencakup fasilitas dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan seni. Hasil wawancara juga mencatat bahwa jumlah usulan yang dapat difasilitasi bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

B. Upaya Organisasi Seni dalam Mengakses dan Mempertahankan Dukungan

Hasil wawancara dengan informan dari organisasi seni memperlihatkan sejumlah upaya yang dilakukan untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan pemerintah. Upaya tersebut meliputi pencarian informasi, pengajuan proposal, komunikasi dengan pihak terkait, pengembangan jaringan, penguatan tata kelola, serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Setiap informan menyampaikan pengalaman yang berbeda sesuai dengan aktivitas, sumber daya, dan prioritas organisasinya. Rangkuman pengalaman kelima informan organisasi seni disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Upaya Organisasi Seni dalam Mengakses dan Mempertahankan Dukungan

Informan	Upaya atau pengalaman yang disampaikan
I1	Aktif mencari informasi mengenai peluang dukungan, menghubungi pihak yang memiliki program, menyusun proposal, menjalin komunikasi, serta memenuhi persyaratan dan pertanggungjawaban kegiatan.
I2	Membangun personal branding dan jaringan, memperoleh pengalaman mengenai birokrasi dan program seni budaya, membentuk tim, mengembangkan tata kelola dan legalitas sanggar, serta menjalankan kegiatan secara rutin.
I3	Mempertahankan prinsip artistik organisasi dalam hubungan kerja sama. Informan menyampaikan bahwa kerja sama tidak dilanjutkan ketika tidak tercapai kesepakatan.

I4	Memusatkan sumber daya yang tersedia pada pembinaan anak. Informan menyebutkan pernah memperoleh dukungan fasilitas, tetapi tidak selalu aktif mengajukan dukungan baru.
I5	Menjadi salah satu informan organisasi seni dalam penelitian mengenai pengalaman memperoleh dan mempertahankan dukungan pemerintah.

Tabel 2 merangkum variasi upaya dan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing informan organisasi seni. I1 menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan pencarian informasi, pengajuan usulan, komunikasi, dan pertanggungjawaban. I2 menguraikan pengalaman membangun jaringan, tata kelola, legalitas, dan aktivitas sanggar, sedangkan I3 menyampaikan pengalaman terkait prinsip artistik dan kesepakatan kerja sama. I4 menjelaskan prioritas pembinaan anak dan pengalaman memperoleh fasilitas, sementara informasi khusus mengenai I5 perlu disajikan lebih terperinci apabila tersedia dalam transkrip atau catatan wawancara.

C. Pertimbangan Pemerintah dalam Memilih dan Mempertahankan Mitra

Wawancara dengan informan pemerintah (IP) mengidentifikasi beberapa pertimbangan dalam menentukan organisasi seni yang dapat dilibatkan dalam kegiatan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kesesuaian proposal terhadap program, ketersediaan anggaran, komunikasi dan proses negosiasi, evaluasi kegiatan sebelumnya, serta aspek administratif organisasi. IP juga menyampaikan perhatian terhadap perkembangan dan inovasi kegiatan seni. Rangkuman pertimbangan pemerintah berdasarkan hasil wawancara disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertimbangan Pemerintah dalam Memilih dan Mempertahankan Mitra Organisasi Seni

No.	Pertimbangan	Keterangan berdasarkan hasil wawancara
1	Kesesuaian proposal	Usulan kegiatan dipertimbangkan berdasarkan kesesuaiannya dengan program pemerintah.
2	Ketersediaan anggaran	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi menyesuaikan anggaran yang tersedia.
3	Komunikasi dan negosiasi	Pemerintah mengundang organisasi untuk melakukan presentasi dan membicarakan kebutuhan kegiatan, termasuk ketika terdapat perbedaan antara kebutuhan biaya dan kemampuan pendanaan.
4	Kinerja dan evaluasi sebelumnya	Pelaksanaan kegiatan terdahulu dan hasil evaluasinya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
5	Legalitas dan alamat organisasi	Aspek legalitas serta informasi alamat organisasi turut diperhatikan dalam proses pertimbangan.
6	Perkembangan kegiatan seni	Pemerintah mempertimbangkan pengembangan kegiatan, termasuk aspek kreativitas, penelitian, dan inovasi.
7	Etika komunikasi	Cara organisasi berkomunikasi dengan pihak pemerintah menjadi salah satu aspek yang disebutkan dalam wawancara.

Tabel 3 merangkum pertimbangan yang disampaikan IP dalam proses pemilihan dan keberlanjutan kerja sama dengan organisasi seni. Keterangan informan mencakup aspek program, anggaran, administrasi, komunikasi, dan pelaksanaan kegiatan. IP juga memberikan contoh bahwa jumlah proposal yang diterima dapat melebihi jumlah kegiatan yang mampu difasilitasi, sehingga dilakukan seleksi terhadap usulan. Selain itu, wawancara mencatat adanya

proses presentasi dan pembicaraan mengenai kebutuhan kegiatan ketika organisasi mengajukan proposal.

Pembahasan

Dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi seni pertunjukan di Kota Palangka Raya mencakup pendanaan, penyediaan fasilitas, kesempatan untuk tampil, akses terhadap program, serta rekomendasi atau rujukan kegiatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah dan organisasi seni tidak hanya berkaitan dengan bantuan finansial, tetapi juga dengan terbukanya akses terhadap ruang, jaringan, dan kegiatan kebudayaan. Dalam konteks tersebut, dukungan pemerintah dapat dibahas sebagai bagian dari ekosistem yang memungkinkan organisasi seni menjalankan aktivitasnya. Kasmita et al. (2026), melalui kajian pendampingan manajemen keberlanjutan sanggar seni, dan Murtini et al. (2026), yang membahas kemitraan serta kolaborasi dalam industri seni pertunjukan, menyediakan landasan untuk memahami keterkaitan antara dukungan kelembagaan, pengelolaan organisasi, dan keberlanjutan kegiatan seni. Meskipun demikian, temuan penelitian ini perlu dibaca sesuai dengan konteks Palangka Raya dan tidak secara otomatis dianggap mewakili seluruh organisasi seni di daerah lain.

Bentuk dukungan yang ditemukan juga menunjukkan bahwa akses organisasi terhadap sumber daya pemerintah berkaitan dengan mekanisme pengajuan program dan penilaian proposal. Kesesuaian kegiatan dengan program, ketersediaan anggaran, proses komunikasi, serta pertimbangan terhadap pengalaman sebelumnya menjadi bagian dari proses yang disampaikan informan. Dengan demikian, keberadaan dukungan tidak berarti setiap organisasi memperoleh fasilitas atau pendanaan secara seragam, sebab akses tersebut tetap berhubungan dengan prosedur dan pertimbangan tertentu. Temuan ini dapat diperbandingkan secara konseptual dengan Kuo dan Dick (2026), yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penghijauan teknologi informasi organisasi, serta Chen et al. (2026), yang mengembangkan model proses pembentukan komitmen dalam kemitraan pembeli-pemasok. Kedua kajian tersebut bukan bukti langsung mengenai tata kelola seni di Palangka Raya, tetapi dapat menjadi rujukan untuk memperluas pembahasan tentang bagaimana proses organisasi, hubungan antarpihak, dan mekanisme kerja sama berpotensi memengaruhi keberlangsungan suatu kemitraan.

Perbedaan upaya yang dilakukan organisasi seni menunjukkan bahwa masing-masing informan memiliki cara tersendiri dalam membangun hubungan dengan pemerintah. Upaya tersebut mencakup pencarian informasi, pengajuan proposal, komunikasi, pemeliharaan jaringan, penguatan identitas organisasi, pemenuhan aspek legalitas, serta pengembangan kegiatan artistik. Pada sisi lain, terdapat organisasi yang lebih mengutamakan kegiatan tertentu, seperti pelatihan anak, atau tidak melanjutkan kerja sama ketika kesepakatan yang diperlukan belum tercapai. Variasi tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan organisasi dalam kemitraan tidak berlangsung melalui satu pola yang sama. Pembahasan ini beririsan dengan Bagaskara dan Sumarwahyudi (2026), yang mengangkat sinergi seniman, institusi pendidikan, dan komunitas dalam ekosistem industri kreatif berkelanjutan, serta Manzano et al. (2026), yang membahas saling ketergantungan dalam ekosistem seni kontemporer di Milan. Kedua rujukan tersebut dapat membantu menempatkan upaya organisasi dalam konteks relasi antarpelaku, tanpa menganggap bahwa bentuk hubungan yang ditemukan di Milan atau dalam kajian ekosistem kreatif lainnya identik dengan kondisi Palangka Raya.

Pertimbangan pemerintah terhadap organisasi seni juga berkaitan dengan kesiapan dan kelayakan kegiatan yang diajukan. Informan menyebutkan sejumlah aspek, antara lain kesesuaian proposal, kemampuan anggaran, hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, legalitas organisasi, komunikasi, serta kesiapan karya dan pengembangan artistik. Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan melibatkan kebutuhan organisasi seni sekaligus pertimbangan administratif dan programatik dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, dukungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pengajuan, penilaian, komunikasi, dan penyesuaian antara pihak-pihak terkait. Murtini et al. (2026) dapat digunakan untuk mengaitkan temuan ini dengan pembahasan mengenai manajemen kemitraan dan kolaborasi dalam industri seni pertunjukan, sedangkan Chen et al. (2026) dapat menjadi rujukan konseptual untuk mendiskusikan proses terbentuknya hubungan kerja sama. Namun, penelitian ini tidak menguji model kemitraan tersebut secara langsung sehingga keterkaitannya perlu diposisikan sebagai pembanding konseptual, bukan sebagai konfirmasi empiris.

Keberlanjutan organisasi seni dalam penelitian ini juga berhubungan dengan kemampuan mengelola sumber daya dan mempertahankan aktivitas kelembagaan. Temuan mengenai pengelolaan komunikasi, pemenuhan persyaratan organisasi, pengembangan kegiatan, dan pemanfaatan kesempatan tampil memperlihatkan beberapa aspek yang menyertai usaha organisasi untuk tetap aktif. Indraningtyas et al. (2026), yang membahas penguatan literasi dan manajemen keuangan pada sanggar tari tradisi Kalijaro Taruno Mudo, relevan untuk memperluas pembahasan mengenai kapasitas pengelolaan organisasi. Kasmita et al. (2026) juga dapat digunakan untuk menghubungkan persoalan keberlanjutan sanggar dengan pendampingan manajemen. Selain itu, Rahayu (2026), melalui kajian pengembangan pariwisata budaya Kota Tanjungpinang yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, memberikan konteks pembanding mengenai tantangan sumber daya dalam kegiatan berbasis budaya. Akan tetapi, penelitian di Palangka Raya ini tidak menyediakan pengukuran komparatif tentang kapasitas keuangan atau sumber daya manusia setiap organisasi, sehingga hubungan antara kapasitas tersebut dan keberlanjutan belum dapat dinyatakan sebagai hubungan sebab-akibat.

Dimensi pelestarian budaya turut memberikan konteks yang lebih luas bagi hubungan antara pemerintah dan organisasi seni pertunjukan. Kegiatan organisasi tidak hanya berhubungan dengan keberlangsungan kelompok, tetapi juga dengan pelaksanaan dan pengembangan praktik seni yang memiliki nilai budaya. Dwilestari et al. (2026), yang mengkaji strategi preservasi warisan budaya pada generasi muda di Indonesia, dapat menjadi rujukan untuk membahas keterkaitan kegiatan seni dengan pewarisan budaya antargenerasi. Sementara itu, Saragih et al. (2026), melalui studi arsip dan dokumentasi mengenai peran SIMPASSRI dalam perkembangan seni rupa Medan pada 1970–1990, menyediakan sudut pandang historis tentang peran organisasi dalam kehidupan seni. Ramadhani et al. (2026), yang membahas negosiasi kultural dan adaptasi ekonomi dalam pelestarian tradisi kain Troso, juga dapat digunakan untuk menempatkan pelestarian budaya dalam hubungan dengan penyesuaian sosial-ekonomi. Rujukan-rujukan tersebut memperkaya konteks pembahasan, tetapi objek dan fokusnya berbeda dari organisasi seni pertunjukan di Palangka Raya; karena itu, persamaan maupun perbedaannya perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa akses terhadap dukungan pemerintah, upaya organisasi, dan pertimbangan pemerintah merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan dalam praktik kemitraan. Organisasi berusaha membangun akses melalui

komunikasi, proposal, jaringan, dan kesiapan kelembagaan, sedangkan pemerintah mempertimbangkan kesesuaian program, anggaran, legalitas, serta kesiapan kegiatan sebelum memberikan dukungan. Hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan bentuk dukungan yang sama bagi setiap organisasi, dan data penelitian juga memperlihatkan variasi dalam cara organisasi merespons peluang kemitraan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemaparan pengalaman para informan mengenai mekanisme dukungan dan praktik membangun kemitraan dalam konteks lokal Palangka Raya, bukan pada penetapan model universal bagi seluruh organisasi seni. Dengan menghubungkan temuan dengan kajian Kasmita et al. (2026), Murtini et al. (2026), Dwilestari et al. (2026), Saragih et al. (2026), Indraningtyas et al. (2026), Bagaskara dan Sumarwahyudi (2026), Ramadhani et al. (2026), Rahayu (2026), Kuo dan Dick (2026), Chen et al. (2026), serta Manzano et al. (2026), pembahasan ini menempatkan kemitraan sebagai proses yang melibatkan dimensi kelembagaan, pengelolaan, jaringan, dan keberlanjutan budaya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan variasi organisasi yang dikaji serta menelusuri perkembangan kemitraan dalam rentang waktu yang lebih panjang agar dinamika hubungan tersebut dapat dipahami dengan lebih mendalam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akses organisasi seni pertunjukan terhadap dukungan pemerintah di Kota Palangka Raya terbentuk melalui keterkaitan antara kesiapan organisasi, mekanisme kelembagaan, dan kualitas interaksi antarpihak. Ketersediaan program atau pendanaan belum dengan sendirinya menjamin akses yang sama bagi setiap organisasi, karena proses kemitraan juga melibatkan pengajuan proposal, pemenuhan persyaratan administratif, komunikasi, serta kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Organisasi seni merespons kondisi tersebut melalui beragam strategi, seperti membangun jaringan, memperkuat personal branding, mengembangkan tata kelola dan sumber daya manusia, serta menentukan prioritas berdasarkan kapasitas masing-masing. Pada saat yang sama, negosiasi tidak selalu berujung pada penyesuaian sepihak, sebab organisasi tetap dapat mempertahankan prinsip artistik ketika terdapat perbedaan pandangan. Dengan demikian, kemitraan pemerintah dan organisasi seni dapat dimaknai sebagai proses dinamis untuk mempertemukan kepentingan, kesiapan, dan batas-batas kelembagaan masing-masing pihak.

Temuan ini memberikan pemahaman kontekstual bahwa keberlanjutan kemitraan seni tidak hanya berkaitan dengan bantuan yang diterima, tetapi juga dengan kemampuan para pihak membangun hubungan dan mengelola proses kerja sama. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi seni untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dan komunikasi, serta bagi pemerintah untuk terus memperhatikan kesesuaian program dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Namun, penerapan hasil tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lokal dan keragaman kapasitas organisasi, sehingga tidak diperlakukan sebagai pola yang berlaku seragam di semua daerah. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak organisasi dengan karakteristik berbeda dan menelusuri perkembangan kemitraan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan mekanisme dukungan, kapasitas organisasi, dan proses negosiasi berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan seni serta pelestarian budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, L. Y., Lazuardi, A. B., Yasa, I. N. M., & Nata, I. G. A. K. (2026). Penguatan ekosistem seni tradisional Sasak melalui tata kelola keuangan, pertunjukan kreatif, dan

- branding budaya pada Komunitas Kampoeng Baca Pelangi di Lombok Barat. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 566–576. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/6689>
- Ardiyasa, I. P. (2021). Strategi peningkatan stakeholder baru organisasi seni pertunjukan. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 7(1), 21–30. <https://doi.org/10.24821/jtks.v7i1.4205>
- Bagaskara, B., & Sumarwahyudi, S. (2026). Sinergi seniman, institusi pendidikan, dan komunitas dalam ekosistem industri kreatif berkelanjutan. *Journal of Language, Literature, and Arts*, 6(7), 1000–1026. <https://citeus.um.ac.id/jolla/vol6/iss7/9/>
- Chen, C. H., Chen, C. T., Cheng, Z. H., & Lee, J. Y. (2026). From coercion to commitment: A process model on forging a committed core in a buyer–supplier partnership. *Journal of Organizational Change Management*, 39(3), 723–742. <https://doi.org/10.1108/JOCM-09-2025-0804>
- Dwilestari, E., Handayani, F., Lestari, S., Adrian, O., & Padilah, S. (2026). Strategi preservasi warisan budaya pada generasi muda di Indonesia. *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah*, 3(1), 241–258. <https://tigajurnal.iainkerinci.ac.id/index.php/pik/article/view/6898>
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025, April). Analisis strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 422–431. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/358>
- Hajmohammad, S., Sedighi, M., & Sadeghi, S. (2026). Innovating for financial sustainability in nonprofit symphony orchestras: A dynamic capabilities perspective. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 08997640261432521. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/08997640261432521>
- Handayaningrum, W., Abdillah, A., Arumynathan, P., & Vong, J. (2021). Conservation management of performing art in East Java: A case study of traditional dances. *Conservation Science in Cultural Heritage*, 21(1), 279–297. <https://conservation-science.unibo.it/article/view/15255>
- Hidayat, V., Irlawan, R., Rozan, M. A., & Saefulrahman, I. (2025). Peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 420–429. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6749>
- Indraningtyas, Y., Sundari, P., Widagdo, T. H., Nurcahyo, S. A., & Ali, A. (2026). Penguatan literasi dan manajemen keuangan guna mendukung keberlanjutan organisasi Sanggar Tari Tradisi Kalijaro Taruno Mudo. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 4(2), 95–103. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JKB/article/view/4356>
- Kasmita, M., Baharuddin, A., Tadampali, A. C. T., & Muchran, M. (2026). Pendampingan manajemen keberlanjutan sanggar seni sebagai penguatan ekonomi kreatif daerah. *TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 84–91. <https://journal.unm.ac.id/index.php/TEKNOVOKASI/article/view/12872>
- Kuo, B., & Dick, G. (2026). The greening of organisational IT: What makes a difference? *The Australasian Journal of Information Systems*, 16(2), 32. <https://aisel.aisnet.org/ajis/vol16/iss2/32/>
- Lin, Y., & Luo, H. (2023). An international perspective on arts and cultural funding: Private, public, and hybrid models. In Y. Jung, N. Vakharia, & M. Vecco (Eds.), *The Oxford*

- handbook of arts and cultural management* (pp. 523–544). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197621615.013.30>
- Manzano, C., Nessi, C., d'Ovidio, M., Bracci, M., & Raccanelli, L. (2026). The art of taking space: Interdependencies in the contemporary art ecosystem in Milan, Italy. *Space and Culture*, 29(3), 523–540.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/12063312251363055>
- Murtini, M., Hariningsih, E., & Karti, G. P. (2026). Manajemen kemitraan dan kolaborasi dalam industri seni pertunjukan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 28–34.
<https://jurnal.stibsa.ac.id/index.php/abdimas-stibsa/article/view/271>
- Nisa, B. S. I. H., Putri, S. S., Tanujiwa, M. A. M., Anastasya, R. E., Salsabila, T. Z., & Nisa, N. K. (2025). Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya di Desa Wisata Bumi Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9740–9752.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2691>
- O'Brien, D., Rees, G., & Taylor, M. (2023). Cultural governance within and across cities and regions: Evidence from the English publicly funded arts sector. *European Urban and Regional Studies*, 30(2), 186–204.
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09697764221113750>
- Rahayu, I. (2026). Analisis pengembangan pariwisata budaya Kota Tanjungpinang menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia. *Jurnal Mata Pariwisata*, 5(1), 102–107.
<https://oai.jurnal.btp.ac.id/index.php/mata-btp/article/view/503>
- Ramadhani, C. M., Wibowo, D. D., & Widagdo, J. (2026). Negosiasi kultural dan adaptasi ekonomi dalam melestarikan tradisi kain Trosro. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(7), 2381–2397.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/2812>
- Saragih, L. T., Utama, D., Yusrina, S., & Atmojo, W. T. (2026). Peran SIMPASSRI dalam perkembangan seni rupa Medan 1970–1990: Studi arsip dan dokumentasi. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisiplin*, 10(4). <https://ojs.ubesco.com/index.php/jikm/article/view/1371>
- Sukardi, A. M., Fiqraz, M. F., Putra, M. A. A., Saputriana, A. R., Ersonia, D. M., & Wulandari, P. K. (2025). Kolaborasi antar aktor pemerintah dan Asosiasi Museum Daerah Jawa Timur (AMIDA) dalam melestarikan Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Heritage Malang. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 82–97. <http://www.jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/Albayan/article/view/413>
- Syaifudin, M. (2025). Mengelola hubungan berbagai stakeholders dalam manajemen strategis. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2), 1426–1435.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/7114>